

#### GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/ 66 /INPTD/2021

#### TENTANG

## PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS RESIKO DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

### GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko, perlu disusun Rencana Pengawasan Tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan;
  - bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
- 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 23 seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

EDUA: Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Fokus dan sasaran serta hal-hal lain yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KELIMA: Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Provinsi kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. **KEENAM** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

**KETUJUH** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 9 Februari 2021

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Irjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Inspektur kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEP.BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/ 66/INPTD/2021 TANGGAL : 9 Februari 2021

## FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah

2. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu:

a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;

b. penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat sesuai dengan kewenangannya; dan

c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

4. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat

Daerah, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

 reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan;

4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan

optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;

7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;

8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian

Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;

9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) dana desa:

- a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa;
- b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sasaran:

a) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan

- b) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
- 5. Pengawalan Reformasi Birokrasi
  - a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
    - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
    - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
    - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
    - 4) penilaian internal zona integritas;
    - 5) penanganan benturan kepentingan;
    - 6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
    - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
- 6. Penegakan Integritas
  - a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
  - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan Korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
- 7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
  - a. Penerapan Manajemen Risiko;
  - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
  - c. Audit Kinerja;
  - d. Audit Investigasi;
  - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
  - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor, dan
  - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KEP.BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/66/INPTD/2021 TANGGAL : 9 Februari 2021

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS RESIKO DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

A. SCHEDULE.	OBYEK PENGAWASAN	JADWAL RENCANA PELAKSANAAN																		
0		J	AN	FEB	MAR	APR	N	1EI	JU	N	JUL	AG	s	SEP		окт		NOV		DES
PENGAWASAN OLEH	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RE	PUBLIK INDON	ESIA K	E PRO	VINSI KE	PULAU	AN BA	NGKA	BEL	ITUN	G									
	dap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah		TIM	HI						11	IJIJ									
	PULAUAN BANGKA BELITUNG																			
1 Biro Hukum				$\mathcal{A}^{-1}$								PKPK								
2 Biro Kesejahteraan	Rakvat		нв							11		PKPK								
3 Biro Organisasi												РКРК								
4 Biro Pemerintahan			нв									PKPK								
5 Biro Perekonomian												PKPK	-11			11				
6 Biro Layanan Penga												PKPK						1 1		
7 Biro Umum												PKPK				1 1			<u> </u>	
EKRETARIAT DPRD	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG															1 1				
8 Sekretariat DPRD															PI	KPK			<u> </u>	
ZANTOR DI LINGKIII	DESTRUCT VERNIL ALIAN DANCICA DEL ITUNG																			2021
VAMION DI PINGROI	P PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG														1	00000 000000000000000000000000000000000			53 (6) (1) (1) (2) (3) (5) (6) (1)	100000000000000000000000000000000000000
					РКРК															
9 Kantor Satuan Poli		<u> </u>			РКРК															
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P	isi Pamong Praja PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				PKPK					РКРК										
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan	isi Pamong Praja PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									РКРК		LHLH								
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan	isi Pamong Praja PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata				PW					PKPK		LHLH						PK PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan da	isi Pamong Praja PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata		НВ		PK PK					PKPK		LH DH		РКРК			P	rk PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan da 13 Dinas Kesehatan	isi Pamong Praja PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata		НВ		PK PK					PKPK				РКРК	P	KPK	P	PK PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan da 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial	isi Pamong Praja PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata n Perikanan				PK PK					PKPK		PKPK		РКРК	P		P	PK PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan dar 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial 15 Dinas Komunikasi	isi Pamong Praja PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata n Perikanan dan Informatika		нв		PK PK					PKPK				PKPK	P	KM		K PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan dar 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial 15 Dinas Komunikasi 16 Dinas Koperasi, Us	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata n Perikanan dan Informatika saha Mikro, Kecil dan Menengah		нв		PKPK PKPK PAPA					PKPK				РКРК	P	KM.	крк	K PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan da 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial 15 Dinas Komunikasi 16 Dinas Koperasi, Us 17 Dinas Pekerjaan U	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata n Perikanan dan Informatika saha Mikro, Kecil dan Menengah fmum dan Penataan Ruang		нв		PK PK PK PAPA					PKPK				РКРК	P	KM.		K PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan da 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial 15 Dinas Komunikasi 16 Dinas Koperasi, Us 17 Dinas Pekerjaan U 18 Dinas Perumahan	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dan Pariwisata  n Perikanan  dan Informatika saha Mikro, Kecil dan Menengah mum dan Penataan Ruang Rakyat dan Kawasan Permukiman		нв		PW PKPK PAPA					PKPK		РКРК			P	KM.	крк	PK PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan da 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial 15 Dinas Komunikasi 16 Dinas Koperasi, Us 17 Dinas Pekerjaan U 18 Dinas Perumahan 19 Dinas Kepemudaa	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dan Pariwisata  n Perikanan  dan Informatika saha Mikro, Kecil dan Menengah mum dan Penataan Ruang Rakyat dan Kawasan Permukiman		HB HB		PW PK PK PK PK PK PK PK PK			DB		PKPK		РКРК			P	KM.	крк	PK PK		
9 Kantor Satuan Poli DINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan da 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial 15 Dinas Komunikasi 16 Dinas Koperasi, Us 17 Dinas Pekerjaan U	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata  n Perikanan  dan Informatika saha Mikro, Kecil dan Menengah mum dan Penataan Ruang Rakyat dan Kawasan Permukiman n dan Olah Raga		HB HB HB		PK PK PK PAPA			DB				РКРК			P	KM.	крк	K PK		
9 Kantor Satuan Poli OINAS DI LINGKUP P 10 Dinas Kebudayaan 11 Dinas Kehutanan 12 Dinas Kelautan dar 13 Dinas Kesehatan 14 Dinas Sosial 15 Dinas Komunikasi 16 Dinas Koperasi, Us 17 Dinas Pekerjaan U 18 Dinas Perumahan 19 Dinas Kepemudaar 20 Dinas Pendidikan	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan Pariwisata  n Perikanan  dan Informatika saha Mikro, Kecil dan Menengah mum dan Penataan Ruang Rakyat dan Kawasan Permukiman n dan Olah Raga		HB HB HB		PW PK PK PK PK PK PK PK PK		DG	DB			PKPK	РКРК			P	KM.	крк	K PK		

	JADWAL RENCANA PELAKSANAAN											
OBYEK PENGAWASAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	окт	NOV	DES
Dinas Pertanian		HILL					TNTN			РК РК		
5 Dinas Tenaga Kerja						РКР	K		Q in I			
5 Dinas Pangan				101			TNTN			PKPK		
7 Dinas PPPA Dukcapil (DP3ACSKB)								PKPK				
BDinas Lingkungan Hidup			PKPK					LHLH				
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										PKPK		
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	РКР	ς		PM								
1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			PKPK	AN		AN	1/1/11					
2 Inspektorat Daerah											PKPK	
ADAN DI LINGKUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												
3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah					PI	K PK						
4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											PK PK	
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											PK PK	
6 Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbangda									PKPK			
6 Badan Perencanaan Pembangunan dan Embangda 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah								РКРК				
			РКРК									
8 Badan Penghubung Provinsi EMBAGA TEKNIS/UPTD/SEKOLAH												
		THE			TTIL	1801 189			80 S V	PKPK		
9 Rumah Sakit Jiwa Daerah			PAPA			7 117				PKPK		
0 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				PKPI	K						3 O S O S O	10000
1 SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota												
ENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS PADA KABUPATEN/KOTA		ППП	<b>1</b>	HILL	TIME	IDID	$\mathbf{T}$	TILLI	TIL	DE PROPERTY		
2 Kabupaten Bangka		4111				IDID						
3 Kabupaten Bangka Tengah					1111				ID ID			
4 Kabupaten Bangka Barat								ID ID				
5 Kabupaten Bangka Selatan								ID ID			MOLENO SIDE	100
6 Kabupaten Belitung		++++							IDII	5		
7 Kabupaten Belitung Timur		++++	++++	+++		1111		ID ID				
8 Kota Pangkalpinang	5 A 1 1 1 1				1111		1111			L. L. L. AL. AL. L		
REVIU			TIT	T 1 1 1	1111	1111		-1111	TIT	11111		THE
19 Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah		IDID										
50 Reviu Laporan Kinerja (Lapkin)			ID ID						4++	++++		
51 Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			ID II		1111	+++						<del>                                      </del>
52 Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi			ID ID	diluli						1111111	<u>, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 </u>	
KEGIATAN EVALUASI										11111	1111	1 1 1
56 Evaluasi LAPKIN PD lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					ID ID							
57 Evaluasi LAPKIN PD Kabupaten/Kota							ID ID					
EVALUASI LAPKIN									- T T T			1 1 1
58 Evaluasi EKPPD Kabupaten/Kota						ID ID						
CASH OPNAME DAN STOCK OPNAME	2001 - 100 -											
59 Kas Opname & Stock Opname Semester	Crisis and the Hill College						ID ID				grafi-analysis	-(1/1)
60 Kas Opname & Stock Opname Akhir Tahun												

		JADWAL RENCANA PELAKSANAAN													
NO OBYEK PENGAWASAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	окт	NOV	DES			
61 Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka		IDID													
62 Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka Tengah		IDID													
63 Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka Barat		IDID								11111					
64 Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka Selatan		IDID													
65 Pemeriksaan DABA Kabupaten Belitung		IDID				1111	+++	4444							
66 Pemeriksaan DABA Kabupaten Belitung Timur		IDID					+++		1111						
67 Pemeriksaan DABA Kota Pangkalpinang		IDID				1.1.1.1	1111		1 1 1 1						
PEMERIKSAAN HIBAH/BANSOS			el Carlo	1 1 1 1				1111	1111		шт				
68 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka		IDID					4444			1111					
69 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka Tengah		IDID							4114						
70 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka Barat		IDID				+ + + +				+ + + +					
71 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka Selatan		IDID		Treat Col				1111							
72 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Belitung		IDID			+++	444		4444	$1 \mid 1 \mid 1$	1111					
73 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Belitung Timur		IDID													
74 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kota Pangkalpinang		IDID		1114	$\perp \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$					The Park Control					
75 Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Badan/Lembaga lainnya		IDID							1111						
PEMERIKSAAN HIBAH/BANSOS							30,70			<del></del>					
76Kabupaten Bangka						ID ID		1111							
77 Kabupaten Bangka Tengah		9		1111		ID ID	444								
78 Kabupaten Bangka Barat				$\perp \perp \perp \perp$		ID ID	1111								
79 Kabupaten Bangka Selatan						ID ID		444							
80 Kabupaten Belitung						ID ID									
81 Kabupaten Belitung Timur					144	ID ID									
82 Kota Pangkalpinang						ID ID									

#### Keterangan:

IJ	:	Itjen Kemendagri	DG		itjen kemendag	LU		mspektorat Daeran
DB	:	Itjen Kemendikbud	KM	:	Itjen Kemenkop & UKM	PK	:	Pengawasan Kinerja/Keuangan
PW	ŀ	Kementerian Pariwisata	AN	]:	Perpustakaan Nasional RI (Dekon)	тт	:	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
TN		Itjen Kementan	AN	ŀ	Perpustakaan Nasional RI (DAK)	RK	<b>!</b> :	Reviu Laporan Kinerja
LH	:	Itjen Kemenhut dan LH	PM	ŀ	Badan Koordinasi Penanaman Modal	RU	]:	Reviu Laporan Keuangan

Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota Reviu SAKIP Reviu EKPPD

Pengawasan Keuangan Sekolah

: Probity Audit

UT

RS

RE

KS

HB : Pengawasan Hibah/Bansos

DD

Asistensi Pengawasan Dana Desa B. TENTATIVE DAN SITUASIONAL

٠. ب	TENTATIVE DAN SITUASIONAL					JADWA	AL RENCAI	NA PELAK	SANAAN				
NO	OBYEK/JENIS PENGAWASAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	окт	NOV	DES
Α.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				,								
1	Pemeriksaan investigatif												
2	penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya												
3	Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah					<u> </u>						1	
в.	Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah												
a.	Kinerja Rutin Pengawasan												
1	Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)					7							
2	Reviu rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)										N. I		
3	Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)												
4	Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan:		11/2									1 300 100	
	- Reviu RKPD		1000	4-16-3				1 1 1 1 1 1			1.7 5.2	<u> </u>	
	- Reviu Renja PD										100-00-00		
	- Reviu KUA/PPAS								1000000	( Specificant			Developing
	- Reviu RKA SKPD				August 1911							1	
	- Reviu RKA SKPD Perubahan					1.8		<u> </u>	1	1 1 11		10.00	
5	Reviu Dana DAK												
6	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)										100.000		
7	Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas											1	
8	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP												
b.					1	<u> </u>				1 1			
1	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi												
2	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar												Y STATE
3	Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)												
4	Monitoring dan evaluasi dana desa		and a constraint			40.00	1 4 1 1 1 4 4 1 - 6	4-11-11	10000		10		
5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)												

						JADWA	L RENCAL	VA PELAKS	SANAAN				
NO	OBYEK/JENIS PENGAWASAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	окт	NOV	DES
c.	Pengawalan Reformasi Birokrasi					// H - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y - Y -	, A. J.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1	100 K/S	
1	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi				1 1,								
2	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, meliputi:												1 1
71	sistem pengendalian intern pemerintah;												
	kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;												
	verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;     penilaian internal zona integritas;												
	penanganan benturan kepentingan;												
	penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan												
	penanganan pengaduan masyarakat.		N. T. S.			4					Do Gordo		
D.	Penegakan Integritas		10			100			1		1	1	1
1	Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas												
2	Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan Korupsi								1				
E.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah						The state of				+		1
1	Penerapan Manajemen Risiko								1	1 1		<del>                                     </del>	
2	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko		Cons.										
3	Audit Kinerja					100			1			1	
4	Audit Investigasi			4 3 1 1 1 1		K V		100000					1
5	Pemeriksaan DAK Fisik					1			122		1	1	1
F.	Pengawasan lainnya		K. (1)						0.0000000000000000000000000000000000000		1	1	
1	Probity Audit											1	
2	Audit Forensik												
3	Audit IT												
4	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah												4 10 (2 10)
5	Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi												
6	Penilaian Internal Zona Integritas												
7	Monitoring dan Evaluasi BLUD RSUD										7 (2)		
8	Monitoring dan Evaluasi BLUD RSJD												
9	Reviu Laporan Keuangan BLUD RSUD							į.			1, 1, 1		1

			JADWAL RENCANA PELAKSANAAN													
NO	OBYEK/JENIS PENGAWASAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	окт	NOV	DES			
10 Rev	viu Laporan Keuangan BLUD RSJD								7 7 1 7 7 1 8 3 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(1) (1)		23-727-728			
11 Per	ngelolaan dan Penatausahaan Persediaan dan Aset															
12 Per	ngadaan Barang dan Jasa															
13 Ev	aluasi Pelayanan Publik															
14 Pei	nanganan Laporan Gratifikasi															
15 Per	ndampingan Pengadaan Barang dan Jasa															
16 Mc	onitoring dan Evaluasi Pengadaan CPNS															
17 Se:	rtifikasi Profesi						4 4									
18 Pe:	meriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB) Bupati/Walikota															
19 As	sistensi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		<b>计</b> 基础			(					00 20 00	133.73	<u> </u>			
20 Pe	ngawasan lainnya															

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN